

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Jumlah surplus (deficit) anggaran APBD dengan menggunakan analisis PMK No 72 Tahun 2006 maka jumlah APBD kabupaten Banggai mengalami surplus. Dimana jumlah surplus daerah kabupaten Banggai selama tahun 2010-2014 mempunyai trend peningkatan. Rata-rata peningkatan jumlah surplus daerah kabupaten Banggai setiap tahun sebesar 941,2 juta rupiah.
2. Secara umum jumlah pinjaman daerah kabupaten Banggai selama tahun 2010-2014 mempunyai trend penurunan namun dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pinjaman daerah kabupaten Banggai. Rata-rata penurunan jumlah pinjaman daerah Kabupaten Banggai setiap tahun sebesar 457,5 juta rupiah. Ditinjau lebih dalam lagi pemerintah Kabupaten Banggai selama tahun 2010-2014 memperlihatkan trend peningkatan dari tahun ketahun.
3. Surplus (defisit) APBD dengan menggunakan pendekatan PMK No. 72 Tahun 2006 kabupaten Banggai memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan pinjaman Kabupaten Banggai. Untuk

mengetahui dampak Surplus (defisit) anggaran APBD terhadap pinjaman daerah, digunakan APBD dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Dimana semakin tinggi jumlah surplus APBD maka jumlah pinjaman daerah semakin rendah ini berarti bahwa sebesar 64% perubahan jumlah pinjaman daerah Kabupaten Banggai periode 2010-2014 dipengaruhi jumlah surplus (defisit), sedangkan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh variabel lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka perlu diungkapkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Banggai seharusnya lebih meningkatkan pendapatan, misalnya dengan mengintensifikan pendapatan khususnya untuk pendapatan Asli Daerah (PAD), lebih banyak mengeluarkan peraturan tentang tatacara pengelolaan PAD, dan mencari titik potensial daerah baik dipusat terkonsentrasi misalnya pusat perdagangan maupun didalam dunia bisnis.
2. Jika dilihat dari segi belanja, pemerintah Kabupaten Banggai seharusnya lebih mengurangi pengeluaran (belanja), misalnya mengoptimalkan proses pengawasan belanja, lebih memfokuskan belanja untuk tujuan dan sasaran yang jelas bukan untuk tujuan menghabiskan pendapatan, lebih banyak mengupdate standar-

standar yang berhubungan dengan biaya agar pemerintah tidak melakukan pinjaman daerah secara berlebihan. Mengingat pinjaman daerah sangat beresiko bagi suatu daerah.

3. Dalam hal pembiayaan surplus (deficit) anggaran, seharusnya pemerintah lebih meningkatkan penggunaan dana cadangan, memperbanyak investas ipemerintah yang dapat menghasilkan dividen dan bunga. Mengingat pinjaman daerah sangat beresiko apabila pemerintah terus-terus melakukan pinjaman daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan.2009. *pengelolaan Keuangan Daerah (rangkuman 7 uu, 30 pp dan 15 permendagri)*. Jakarta: Indeks
- Hafiz Tanjung. Abdul, 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta Bandung
- Halim, Abdul. Muhammad, Syam, Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Kenuangan Daerah*, Yogyakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. Damayanti Thersia, 2002. “ *Pengelolaan Keuangan Daerah*”,
- Hastin, Mira, dkk. 2013. Analisis Pasar Obligasi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi. Volume 1.No. 2. Hal. 1*
- Karismawan, Putu. 2011. Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Pembiayaannya Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ganec Swara. Vol. 5 No. 2. Hal. 1*
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. 2010. *Analsis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta: ANDI
- Mursyidi, 2009, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

- Pamuji, Teguh. 2008. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (Tahun 1993-2007)*. Tesis. Semarang. Universitas di Ponegoro
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 22 tentang Pembiayaan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 *tentang Pinjaman Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 15 tentang Struktur APBD*
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung
- Supangat, Andi. 2010. *Statistika (dalam kajian deskriptif, inferensial, dan nonparametik)*. Bandung. Kencana
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Tesamaris, Andiarma. Siti Fatimah. 2005. Analisis Kausalitas antara Hutang Luar Negeri Dengan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 1978-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 6, Nomor 2. Hal. 1*
- UU RI. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah*

Wibisono, Yusuf. 2009. *Metode Statistik*. Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*